

ANALISIS EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN BRIMOB POLDA KALIMANTAN TIMUR

Ade Yoga Pangestu¹, Danna Solihin², Sunarto³
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : yogapangestu1009@gmail.com

Keywords :

Effectiveness, Efficiency, Budget

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness and efficiency of the East Kalimantan Police Mobile Brigade Unit's spending budget for the 2017-2021 period. The study uses public sector accounting theory and tests the hypothesis that the budget utilization has been both effective and efficient during this period. The focus is on the East Kalimantan Police Mobile Brigade Unit, examining both effectiveness and efficiency. The analysis results show that the effectiveness of budget implementation was quite high across the years: 97.76% in 2017, 97.04% in 2018, 97% in 2019, 99.87% in 2020, and 97.53% in 2021, indicating that the budget utilization was effective each year. This confirms the hypothesis that the budget was effectively utilized. However, the efficiency of the budget use was less favorable. In 2017, the efficiency was 97.59%, in 2018 it was 97.53%, in 2019 it was 97.32%, in 2020 it dropped to 94.67%, and in 2021 it further decreased to 90.38%. These figures indicate a decline in efficiency over the years, leading to the rejection of the hypothesis that the budget was efficiently used.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam suatu negara merupakan kebutuhan yang wajib dilaksanakan. Perwujudan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah negara, berlandaskan reformasi manajemen keuangan pemerintah. Reformasi tersebut mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15/2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara.

Mardiasmo (2018:2) mendefinisikan akuntansi sektor publik merupakan “alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik”. Abhishek (2019:26) mendefinisikan akuntansi sektor publik merupakan *public sector accounting is the system of accounting that involves recording and maintenance of books of accounts by the government authorities on their financial performance. The pivotal characteristics of traditional method of public sector accounting were mainly based on single-entry book-keeping, recording financial events on cash basis. But over the period of time public sector accounting is transformed with different modern methods of recording and disclosing the financial affairs of the public sectors i.e., accrual system with the help of well accepted accounting standards.*

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kebijakan pengelolaan keuangan negara dilaksanakan sesuai asas-asas yang baik dalam pengelolaan keuangan negara yaitu asas kesatuan yaitu asas yang menghendaki semua pendapatan dan

belanja negara/daerah disajikan dalam satu dokumen, asas universalitas yaitu asas yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran, asas tahunan yaitu asas yang menghendaki adanya batasan masa berlaku anggaran untuk satu tahun tertentu dan asas spesialisitas yaitu asas yang mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terperinci secara jelas peruntukannya.

Menurut Mahsun (2017:81), definisi anggaran pendapatan dan belanja negara adalah daftar yang memuat rincian penerimaan negara dan pengeluaran belanja negara selama satu tahun. APBN merupakan rencana kerja kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan beban yang merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran. Needles (2014:102) mengemukakan pengertian anggaran yakni, “*Budgeting is the process of identifying, gathering, summarizing, and communicating financial and non financial information about an organization’s future activities.*” Pengertian anggaran menurut Needles (2014:102) ini berarti “Pengannggaran adalah proses mengidentifikasi, mengumpulkan, meringkas, dan mengkomunikasikan informasi keuangan dan non keuangan tentang kegiatan masa depan organisasi”. Nordiawan (2016:9) mendefinisikan anggaran sektor publik adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sector publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocatin resources to unlimited demands*).

Salah satu institusi negara yang difasilitasi oleh negara melalui kemampuan keuangan yang cukup memadai karena sangat besar perannya didalam negara adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang bertindak atas nama pemerintah dalam memberikan rasa aman, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat dan seluruh warga negara. POLRI merupakan lembaga non departemen yang memiliki peran untuk mewujudkan keamanan dalam negeri Indonesia yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hakasasi manusia.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian adalah institusi yang melaksanakan tugas mewujudkan keamanan dalam negeri, meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Polri telah menyesuaikan sistem otorisasi perencanaan dan anggaran mengikuti *budget oriented*. Dalam hal ini POLRI harus memerinci dan merencanakan anggaran belanjanya menurut kebutuhan organisasi, fungsi dan jenis belanja. POLRI wajib menyusun rencana kerja berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Anggaran disusun berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan realisasinya dilaporkan dengan basis prestasi kinerja yang dicapai. Melalui pengawasan yang baik diharapkan akuntabilitas polisi akan lebih baik.

Berlandaskan Peraturan Menkeu Nomor : 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran disusun Rencana Kerja Satuan Brimob Polda Kaltim. Hal ini dalam mendukung tugas-tugas Kepolisian khususnya Satuan Brimob Polda Kaltim dipandang perlu dimulai dari dalam instansi, maka untuk mendukung dan meningkatkan semangat kerja anggota Polri dilaksanakan pemeliharaan Gedung Negara dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan di Satuan Brimob Polda Kaltim yang diperuntukkan bagi personil Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur.

Studi pendahuluan pada Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur mengenai realisasi anggaran belanja per jenis belanja diketahui bahwa anggaran dan realisasi belanja tahun 2018

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017, namun mengalami penurunan di tahun 2019. Adapun pada tahun 2018 realisasi belanja melebihi anggaran dikarenakan pada akhir tahun 2018 personel Satuan Brimob Polda Kaltim terlibat kegiatan operasi aman nusa di DKI Jakarta. Tahun 2020 hingga tahun 2021 realisasi belanja mengalami peningkatan. Berfluktuasinya anggaran dan realisasi belanja dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat mempengaruhi kinerja keuangan Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur. Untuk itu penting menilai efektifitas dan efisiensi anggaran dan realisasi belanja.

Tujuan diadakannya kajian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektifitas penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021 dan tingkat efisiensi penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021.

Hipotesis penelitian yaitu penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sudah efektif periode 2017-2021 dan penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sudah efisien periode 2017-2021.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

1. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang, yaitu periode 2017-2021.
2. Target anggaran belanja merupakan rencana keuangan tahunan Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021 yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutupi keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.
3. Realisasi anggaran belanja merupakan anggaran belanja yang diterima Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021 dalam melaksanakan kegiatan selama satu tahun.
4. Analisis pelaksanaan anggaran belanja adalah usaha untuk mengidentifikasi hasil capaian dari pengelolaan keuangan berdasarkan laporan realisasi anggaran belanja yang tersedia di Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2017-2021.
5. Tingkat efektifitas merupakan kemampuan Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur dalam memobilisasi penerimaan anggaran belanja sesuai dengan yang ditargetkan periode 2017-2021.
6. Tingkat efisiensi merupakan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021.

Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021 dengan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis menitikberatkan pada efektifitas dan efisiensi.

Rincian Data Yang Diperlukan

1. Gambaran umum Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur.
2. Struktur Organisasi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur.
3. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2017-2021.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi pustaka yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur yang ada

diperpustakaan dan semua bacaan yang berkaitan dengan rasio keuangan perusahaan. Pengumpulan data sekunder berupa gambaran umum, struktur organisasi, Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2017-2021 serta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam penelitian ini.

Alat Analisis dan Pengujian Hipotesis

Alat Analisis

1. Analisis Efektifitas Belanja

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan dalam memobilisasi penerimaan anggaran belanja sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi, 2016:143). Rumus rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Efektifitas

Kriteria Efektifitas	Persentase Efektifitas
Sangat efektif	> 100
Efektif	100
Cukup efektif	90-99
Kurang efektif	75-89
Tidak efektif	< 75

Sumber : Mahsun (2017:187)

2. Analisis Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja menurut Mahmudi (2016:39) dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Pegawai}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Efisiensi

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
Tidak efisien	>100
Kurang Efisien	90-100
Cukup Efisien	80-90
Efisien	60-80
Sangat Efisien	<60

Sumber : (Jarkasih , Ruliana dan Rachmawati, 2021:5)

Pengujian Hipotesis

- Hipotesis penelitian ini diterima apabila penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sudah efektif periode 2017-2021 sebesar $\geq 90\%$, sebaliknya hipotesis penelitian ini ditolak apabila penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur kurang efektif periode 2017-2021 sebesar $<90\%$.
- Hipotesis penelitian ini diterima apabila penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sudah efisien periode 2017-2021 sebesar $<90\%$, sebaliknya hipotesis penelitian ini ditolak apabila penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur kurang efisien periode 2017-2021 sebesar $\geq 90\%$.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian ini Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman No. 31 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur 76114. Visi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur yaitu terwujudnya postur Brimob yang professional dengan mengedepankan kemitraan

bersama masyarakat, sinergi professional yang proaktif dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memelihara keamanan dalam negeri.

Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebagai berikut :

Efektifitas

Berikut data hasil perhitungan tingkat efektifitas pelaksanaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021.

Tabel 3. Tingkat efektifitas pelaksanaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021

No	Tahun	Target Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Efektifitas (%)	Kriteria
1	2017	93.276.628.000	91.277.534.000	97,86	Cukup Efektif
2	2018	90.039.341.000	87.377.903.000	97,04	Cukup Efektif
3	2019	83.222.054.000	80.726.710.000	97	Cukup Efektif
4	2020	76.995.656.000	76.893.915.000	99,87	Cukup Efektif
5	2021	81.070.898.000	79.068.204.000	97,53	Cukup Efektif

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa efektifitas pelaksanaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 efektifitas penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar 97,86% artinya cukup efektif dari anggaran belanja Rp93.276.628.000 dan realisasi Rp91.277.534.000. Tahun 2018 efektifitas penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar 97,04% artinya cukup efektif dari anggaran belanja Rp90.039.341.000 dan realisasi Rp87.377.903.000. Tahun 2019 efektifitas penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar 97% artinya cukup efektif dari anggaran belanja Rp83.222.054.000 dan realisasi Rp80.726.710.000. Tahun 2020 efektifitas penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar 99,87% artinya cukup efektif dari anggaran belanja Rp76.995.656.000 dan realisasi Rp76.893.915.000. Tahun 2021 efektifitas penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar 97,53% artinya cukup efektif dari anggaran belanja Rp81.070.898.000 dan realisasi Rp79.068.204.000.

Oleh sebab itu, hipotesis penelitian ini diterima yaitu penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sudah efektif periode 2017-2021 sebesar $\geq 90\%$. Hasil penelitian ini didukung penelitian Sindi (2019) menunjukkan bahwa efektifitas desa sudah efektif.

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan dalam memobilisasi penerimaan anggaran belanja sesuai dengan yang ditargetkan. Sebagai alat negara penegak hukum, POLRI diberi peranan dan fungsi yang sangat penting dalam memberikan kepastian dan keadilan dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. Meskipun reformasi birokrasi di tubuh POLRI telah dilaksanakan selama beberapa dekade terakhir ini, namun kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini relatif masih sangat rendah. Hal tersebut terjadi karena masih terdapatnya sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lembaga ini, khususnya pada reformasi SDM dan anggaran yang memegang bobot tertinggi dari sejumlah reformasi yang tercakup dalam reformasi birokrasi. Kelemahan pelaksanaan reformasi SDM dan anggaran terlihat dari kelemahan kebijakan-kebijakan untuk pengembangan profesionalisme individu POLRI, sistem kepegawaian dan sistem karir maupun pengembangan organisasi POLRI.

Berdasarkan rata-rata tingkat efektifitas pelaksanaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021 diperoleh 98,8% sehingga dapat dikatakan cukup efektif. Maka penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021 yakni menunjukkan sudah cukup efektif.

Efisiensi

Berikut data hasil perhitungan tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021.

Tabel 4. Tingkat efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021

No	Tahun	Realisasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja Pegawai (Rp)	Efisiensi (%)	Kriteria
1	2017	91.277.534.000	89.081.963.000	97,59	Kurang Efisien
2	2018	87.377.903.000	85.215.332.000	97,53	Kurang Efisien
3	2019	80.726.710.000	78.564.139.000	97,32	Kurang Efisien
4	2020	76.893.915.000	72.797.152.000	94,67	Kurang Efisien
5	2021	79.068.204.000	71.462.254.000	90,38	Kurang Efisien

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa efisiensi penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021 mengalami penurunan. Pada tahun 2017 efisiensi penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar 97,59% artinya kurang efisien dari realisasi anggaran belanja pegawai Rp89.081.963.000 dan realisasi anggaran belanja Rp91.277.534.000. Pada tahun 2018 efisiensi penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar 97,53% artinya kurang efisien dari realisasi anggaran belanja pegawai Rp85.215.332.000 dan realisasi anggaran belanja Rp87.377.903.000. Pada tahun 2019 efisiensi penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar 97,32% artinya kurang efisien dari realisasi anggaran belanja pegawai Rp78.564.139.000 dan realisasi anggaran belanja Rp80.726.710.000. Pada tahun 2020 efisiensi penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar 94,67% artinya kurang efisien dari realisasi anggaran belanja pegawai Rp72.797.152.000 dan realisasi anggaran belanja Rp76.893.915.000. Pada tahun 2021 efisiensi penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur sebesar 90,38% artinya kurang efisien dari realisasi anggaran belanja pegawai Rp71.462.254.000 dan realisasi anggaran belanja Rp79.068.204.000.

Oleh sebab itu, hipotesis penelitian ini ditolak yaitu penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur kurang efisien periode 2017-2021 sebesar $\geq 90\%$.

Hasil penelitian ini didukung penelitian Jakarsih (2021) menunjukkan bahwa Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) pada Biro Umum Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2012 – 2016 memiliki nilai lebih dari 100% yang berarti tidak efisien.

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Berdasarkan rata-rata tingkat efisiensi penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021 diperoleh 95,49% sehingga dapat dikatakan kurang efisien. Maka penggunaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur periode 2017-2021 yakni menunjukkan kurang efisien.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Efektifitas pelaksanaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2017 sebesar 97,76% artinya cukup efektif, tahun 2018 sebesar 97,04% artinya cukup efektif, tahun 2019 sebesar 97% artinya cukup efektif, tahun 2020 sebesar 99,87% artinya cukup efektif dan tahun 2021 sebesar 97,53% artinya cukup efektif, artinya hipotesis diterima.
2. Efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur tahun 2017 sebesar 97,59% artinya kurang efisien, tahun 2018 sebesar 97,53% artinya kurang efisien, tahun 2019 sebesar 97,32% artinya kurang efisien, tahun 2020 sebesar 94,67% artinya kurang efisien dan tahun 2021 sebesar 90,38% artinya kurang efisien, artinya hipotesis ditolak.

Saran

1. Bagi Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur agar semakin meningkatkan kinerja dalam pengelolaan Anggaran Belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur secara umum, dengan kinerja yang baik maka efektifitas dan efisiensi belanja juga akan semakin baik.
2. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak- pihak yang terkait dengan pengelolaan anggaran belanja secara khusus dan APBN secara umum.
3. Periode penelitian ini terbatas untuk tahun 2017-2021, diharapkan penelitian selanjutnya menambahkan periode tahun penelitian agar lebih akurat dalam menganalisis pengelolaan Anggaran Belanja Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhishek. 2019. *Public Sector Accounting System - A Conceptual Analysis*. VISION: Journal of Indian Taxation Volume 6, Issue 2, July-December, pp. 25-36 doi: 10.17492/vision.v6i2.186480
- Jakarsih, Muhammad., Dr. Titin Ruliana dan Ida Rachmawati. 2021. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur*. Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. <https://media.neliti.com/media/publications/387112-none-af146fa4.pdf>
- Mahsun, Mohammad. 2017. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPF.
- Mardiasmo. 2018. *Efisiensi dan Efektifitas*. Jakarta: Andy.
- Needles, Belverd E. et. al. 2014. *Financial and Managerial Accounting*. New York : Routledge
- Nordiawan, Dedi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sindi, Marsia. 2019. *Analisis Kinerja Keuangan di Desa Lendung Sari*. Jurnal Program Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tungadewi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah